



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2012-2013**

JUMAT, 12 JULI 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2013**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2012-2013**

JUMAT, 12 JULI 2013

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,

- Para Wakil Ketua,
- Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPR-RI,
- Para Anggota DPR-RI,
- Hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, dan atas hidayahNya, hari ini kita dapat menyelesaikan kegiatan Dewan hingga sampai pada agenda Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013.

Mengawali ibadah puasa pada Bulan Suci Ramadhan 1434 H ini, *insya Allah* seluruh umat Islam dapat menjalani ibadah puasa dengan khusuk dan ikhlas, sehingga amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kepada masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa, mari bersama-sama menciptakan suasana toleransi antar umat beragama, sehingga tercipta suasana tenang dan damai. Memang ada perbedaan penentuan awal Ramadhan 1434 H, namun demikian kiranya perbedaan ini tidak perlu dibesar-besarkan, yang lebih utama adalah menjaga persatuan.

Beberapa waktu yang lalu, kita kembali dikejutkan oleh musibah gempa di beberapa wilayah di tanah air, antara lain di NTB dan baru-baru ini di Aceh, yang membawa banyak korban jiwa dan kerugian material. Atas nama Dewan, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban, dan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) dan BNPB Daerah, serta instansi-instansi terkait, dapat segera menanggulangi akibat terjadinya bencana alam tersebut.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Kita telah melewati 44 hari kerja pada Masa Sidang IV. Dewan telah menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Pada fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah melakukan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2014, pembahasan dan pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

Di tengah padatnya agenda politik menjelang pemilu legislatif tahun 2014, Dewan terus berupaya mengoptimalkan kinerjanya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai Alat Kelengkapan Dewan. Pimpinan Dewan melihat, bahwa kegiatan yang dilakukan cukup efektif di tengah-tengah sorotan masyarakat yang cukup tajam terhadap kinerja DPR.

Di bidang legislasi, Dewan telah dapat menyelesaikan 7 (tujuh) RUU, yaitu RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, RUU tentang APBN-P 2013, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Proses pembahasan beberapa RUU, akhir-akhir ini memakan waktu yang cukup lama, melebihi alokasi waktu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya Dewan untuk menghasilkan UU yang diharapkan berlaku untuk jangka panjang, dan efektif dalam implementasinya.

Ada sekitar 25 (duapuluh lima) RUU yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I dan pembahasannya masih akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. RUU-RUU tersebut telah mendapat persetujuan untuk diperpanjang, baik yang ditangani oleh Komisi-Komisi, Baleg maupun Panitia Khusus.

Untuk RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memakan waktu pembahasan sampai tujuh kali masa sidang, *alhamdulillah*, akhirnya dapat diselesaikan pada tanggal 2 Juli yang lalu. Materi muatan RUU ini telah mengakomodir masukan dari berbagai Ormas, pakar, dan masyarakat umum. Panitia Khusus telah bekerja secara maksimal. Dalam

kesempatan ini Dewan mengingatkan, bahwa ruh dari RUU Ormas bukanlah untuk membelenggu kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, melainkan untuk menata pengelolaan dan penyelenggaraan Ormas. Diharapkan, Ormas dapat berperan menjadi agen perubahan masyarakat, mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, proses pembahasan atas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilaksanakan pada delapan kali masa sidang, telah disetujui untuk disahkan menjadi UU. Muatan materi RUU ini diharapkan dapat mengatasi laju kerusakan hutan Indonesia yang berdampak pada berkurangnya luasan hutan Indonesia.

RUU lain yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat adalah RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan telah disahkannya RUU ini, diharapkan kepentingan para petani semakin terlindungi, terutama ketika menghadapi bencana alam, globalisasi, serta sistem pasar yang tidak adil, yang selama ini semakin menyudutkan keberadaan petani dalam melangsungkan usahanya. Perlindungan ini penting, karena petani merupakan garda terdepan dalam penyediaan pangan masyarakat Indonesia.

RUU tentang Keantariksaan dibentuk antara lain untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan, mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktifitas bangsa, menjamin keberlanjutan keantariksaan bagi kepentingan generasi kini dan masa depan.

RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang dibahas selama tujuh kali masa sidang, mengandung berbagai substansi yang sangat urgen, strategis dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan kedokteran. RUU ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum untuk mengatasi dan mengatur berbagai problem yang terkait dengan proses seleksi, proses belajar-mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta alat-alat laboratorium, tenaga pendidikan, dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran.

Dalam UU ini diatur adanya nomenklatur baru tentang Dokter Layanan Primer sebagai bagian dari pendidikan profesi, dan merupakan salah satu pilihan karir program profesi dokter yang setara dengan program dokter spesialis.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam Masa Sidang IV ini, Dewan telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU tentang APBN-P TA 2013, termasuk perubahan asumsi dasar ekonomi makro untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global dan memperkuat struktur APBN agar terhindar dari beban subsidi yang relatif besar.

Pokok-pokok asumsi dasar ekonomi makro yang mengalami perubahan antara lain, Pertumbuhan Ekonomi disepakati sebesar 6,3%, target inflasi disepakati 7,2%, Nilai Tukar Rupiah (terhadap dolar Amerika) Rp. 9.600,-. harga minyak mentah disepakati sebesar USD108,0 per barel, *lifting* minyak mentah disepakati 840.000 barel per hari, sementara itu *lifting* gas bumi disepakati 1.240.000 barel setara minyak per hari.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut konsekuensinya mempengaruhi besaran dari pendapatan negara. Dalam struktur APBN Tahun Anggaran 2013, Defisit Anggaran ditargetkan sebesar Rp. 153,338 Triliun. Angka ini berubah sesuai dengan perubahan pendapatan negara dan belanja negara, sehingga besaran Defisit Anggaran disepakati menjadi Rp. 224,2 triliun atau meningkat 46% dari APBN Tahun Anggaran 2013.

Terkait dengan persetujuan penyesuaian harga BBM bersubsidi, Dewan terus mendorong Pemerintah untuk memperlancar dan melaksanakan pengawasan dalam pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin, agar disalurkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan energi baru terbarukan, serta program-program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi lainnya.

Program BLSM yang mulai berjalan, hendaknya diawasi secara intens agar tepat sasaran, menghindari seminimal mungkin jatuhnya korban akibat mekanisme pelaksanaan yang kurang baik dan data yang kurang akurat.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah antisipasi dampak akibat penyesuaian harga BBM yang bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan, dipastikan berdampak kepada kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif, melakukan operasi pasar, menindak praktek penimbunan dan mengambil

langkah berani dan tegas dalam pengendalian harga, agar tidak menambah beban masyarakat.

Penyesuaian harga BBM juga harus dijadikan kesempatan bagi Pemerintah untuk mendorong dan mengubah pola hidup masyarakat yang lebih hemat energi. Hal ini dimaksudkan untuk pengelolaan ketahanan energi ke depan menjadi lebih baik dan penghematan anggaran. Seiring dengan tujuan ini, Dewan meminta Pemerintah untuk terus memberikan perhatian bagi pengembangan sarana transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dewan juga sudah mulai membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan rencana asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2014. Dewan mengingatkan Pemerintah agar RAPBN Tahun 2014, benar-benar disusun dan direncanakan dengan baik dan hati-hati. Kalau perlu, Pemerintah tidak menambah hutang baru dalam struktur RAPBN tahun 2014.

Dewan menilai RAPBN Tahun 2014 sebaiknya lebih fokus pada stimulus fiskal, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi (PDB) tetap berada di atas 6,0%. Dewan mendesak Pemerintah untuk tidak menaikkan besaran anggaran belanja negara dalam RAPBN Tahun 2014 yang tidak produktif, seperti belanja perjalanan dinas pusat dan daerah, belanja barang dan jasa, dan lain-lain. Hal ini mengingat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja negara justru meningkat dari Rp. 1.683,011 triliun menjadi Rp. 1.726,191 triliun, dimana porsi terbesar adalah belanja pemerintah pusat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Masa Sidang IV ini Dewan mencermati berbagai persoalan bangsa yang membutuhkan perhatian serius, terutama berkenaan dengan kehidupan berbangsa bernegara dan persoalan kemanusiaan.

Sesuai dengan rekomendasi DPR-RI, Tim Pengawas Kasus Bank Century terus melakukan rapat-rapat untuk memantau perkembangan penanganan kasus ini oleh Aparat Penegak Hukum. Dewan mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus

korupsi, namun Tim Pengawas belum melihat perkembangan yang signifikan, sementara telah ada tambahan dokumen dan data, serta hasil penyelidikan. Tim Pengawas mendorong KPK untuk menelusuri pengembalian aset Bank Century yang diperoleh dalam kaitan kasus Bank Century sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Agar kasus Bank Century dapat segera dituntaskan, maka tugas Tim Pengawas masih akan berlanjut pada masa sidang yang akan datang.

Pada Masa Sidang ini, Dewan telah mengirim delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Korpolkam ke PT. Freeport di Timika, sehubungan dengan kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Freeport, yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 28 orang. Dalam kunjungan tersebut, delegasi telah mendiskusikan permasalahan kecelakaan kerja ini dengan PT Freeport Indonesia, dan meminta PT Freeport memberikan santunan kepada seluruh korban kecelakaan, meminta Pemerintah membentuk Tim Investigasi, agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa datang.

Isu Papua juga kembali menjadi sorotan dunia internasional. Dewan meminta Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara, untuk terus bersinergi dalam melakukan diplomasi untuk mengatasi hal ini. Dewan memandang telah terjadi pergeseran sikap masyarakat internasional terhadap masalah Papua yang lebih terlokalisasi pada isu pelanggaran HAM dan isu kesejahteraan rakyat Papua, sehingga membutuhkan penyelesaian secara internal oleh Pemerintah Indonesia.

Pada wilayah lainnya, Dewan sangat prihatin dengan konflik yang terjadi di Sampang. Dewan telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan aparat dan perangkat daerah, dan Kementerian Agama serta Ormas Keagamaan. Sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia, seharusnya kita mampu memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Dewan meminta Pemerintah Pusat serta Daerah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini guna mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Negara telah menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi negara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Salah satu tugas Dewan di bidang penetapan pejabat publik, selama Masa Sidang IV Dewan telah menetapkan satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan Pengganti Antar

Waktu, 7 (tujuh) Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017, 9 (sembilan) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2013-2016, 23 (dua puluh tiga) anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016, 1 (satu) orang calon Deputi Gubernur BI dan 5 (lima) calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia 2013-2016. Dewan juga telah memproses dan memberikan pertimbangan terhadap Duta Besar Republik Guyana, Libya dan Uni Eropa untuk Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan keputusan Pemerintah Arab Saudi melakukan pengurangan kuota haji untuk tahun pemberangkatan 2013 sebesar 20%, Dewan sangat prihatin. Pengurangan kuota tersebut akan berdampak semakin panjangnya jadwal tunggu jamaah haji Indonesia. Karena negosiasi Pemerintah dan DPR RI dengan Pemerintah Arab Saudi terhadap kebijakan ini sudah final, maka Dewan meminta Pemerintah untuk berlaku adil dan menjelaskan secara transparan kepada para jamaah atas keputusan Pemerintah Arab Saudi. Pengaturan kuota jamaah haji yang ditunda keberangkatannya harus disampaikan sejak awal guna menghindari keresahan di masyarakat.

Masalah lainnya yang menjadi keprihatinan Dewan adalah terjadinya kebakaran hutan dan kabut asap di wilayah Riau. Penting untuk dipahami, bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah akibat dari aktivitas penebangan yang merusak, yang kerap dilakukan saat pembukaan lahan untuk menjadi perkebunan ataupun untuk hutan tanaman industri, dan lemahnya penegakan hukum.

Masalah kebakaran hutan dan kabut asap ini menjadi sorotan internasional terhadap buruknya pengelolaan sektor kehutanan dan lahan. Dewan meminta Pemerintah untuk fokus mengatasi kebakaran hutan, bersikap tegas dan memberikan sanksi terhadap setiap pelaku yang terkait masalah ini, serta segera melakukan tindakan antisipasi pencegahan agar kebakaran tidak terjadi di daerah lain.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Masalah TKI di luar negeri selalu menjadi perhatian utama DPR. Pemerintah wajib memberikan perlindungan, jaminan keselamatan dan keamanan bagi mereka. Oleh sebab

itu sangatlah memprihatinkan terjadinya kerusuhan hingga jatuhnya korban jiwa TKI di KJRI Jeddah dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan seoptimal mungkin terkait dokumen keimigrasian, izin tinggal bagi pekerja WNI *overstayer* dan *non-procedural* dalam pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Dewan memberikan apresiasi atas perpanjangan amnesti oleh Pemerintah Arab Saudi. Namun, perpanjangan amnesti tidak ada artinya, jika tidak ada perubahan pola pelayanan. Perlu adanya *extra ordinary approach* dalam menyelesaikan masalah ini, karena merupakan persoalan kemanusiaan dan harga diri bangsa. Kesempatan ini hendaknya dijadikan momentum untuk penertiban pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk itu, kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, dapat bekerja sama dengan baik dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh majikan TKI dalam rangka memberikan perlindungan kepada TKI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal kegiatan diplomasi parlemen, beberapa hari yang lalu, Dewan telah menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Papua Nugini, Presiden Republik Sosialis Vietnam, dan Wakil Ketua Senat Thailand. Dalam kunjungan ini dibicarakan berbagai hal, antara lain mengenai peluang peningkatan kerja sama antar kedua negara.

Dalam hal kerja sama regional/internasional antar parlemen, banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan dalam bentuk berbagai pengiriman delegasi ke pertemuan antarparlemen yang berskala regional maupun internasional, di antaranya Pengiriman delegasi ke pertemuan *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus* di Vietnam, *AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace* yang ke-10 di Brunei Darussalam, *The 11th Annual Conference of the Parliamentary Network on the World Bank and IMF* di Azerbaijan, *Development Cooperation Forum of the United Nations: First High Level Symposium* yang diselenggarakan di Ethiopia, *The 30th Meeting of the PUIC Executive Committee* di Azerbaijan, dan memimpin kunjungan *IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* ke Amman Yordania, dalam rangka meninjau para

pengungsi asal Syria akibat terjadinya konflik di negara tersebut, dan berbagai delegasi muhibah yang dipimpin oleh Ketua Dewan.

Selain itu, DPR-RI juga telah menyelenggarakan *Workshop National Chapter GOPAC Indonesia* dengan tema "Pendanaan Kegiatan Politik dan Anti Pencucian Uang", bulan Juni 2013 di Jakarta. Workshop berhasil membentuk fondasi yang kokoh dari Gugus Tugas GOPAC Indonesia sebagai sebuah organisasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan penyampaian laporan BAKN DPR-RI di Rapat Paripurna yang lalu, Pimpinan Dewan meminta agar Komisi-Komisi Dewan dapat menindaklanjuti, sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Laporan Ketua BAKN tersebut harus menjadi perhatian kita bersama, karena hasil telaahan menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara yang meliputi hampir semua kementerian/lembaga dan menjadi isu publik di berbagai media massa.

Sementara itu, kita patut bersyukur bahwa baru-baru DPR-RI untuk keempat kalinya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga negara TA 2012 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pimpinan Dewan berharap, prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Sekaligus ini merupakan tantangan, motivasi bagi Sekretariat Jenderal untuk bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada akhir pidato, kami ingin mengingatkan bahwa satu bulan ke depan, kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Kami meminta kepada Pemerintah untuk lebih pro aktif dalam menghadapi hari besar keagamaan ini. Kebijakan operasi pasar misalnya, harus lebih tepat sasaran. Pemerintah agar serius menangani penyediaan transportasi massal, perbaikan infrastruktur dan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat. Harapan besar sekiranya Pemerintah dapat mencanangkan mudik tahun 2013 dengan *zero accident* yang jauh dari resiko kecelakaan.

Selain itu, masalah keamanan dan ketertiban pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri juga perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwa kejahatan pada waktu momentum mudik selalu meningkat. Kejahatan di jalan raya, pencurian, bahkan perampokan harus diantisipasi secara serius oleh aparat keamanan. Oleh sebab itu diharapkan agar masalah keamanan dapat dipersiapkan dengan baik. Masyarakat juga diminta untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Besok kita akan memulai masa reses, oleh sebab itu kepada seluruh anggota Dewan diharapkan dapat menggunakan masa reses secara efektif dan efisien. Masa reses ini tentu dapat diisi dengan kegiatan bersama para konstituen yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013. Atas segala perhatian saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamuálaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 12 Juli 2013

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. Marzuki Alie